

LAPORAN AKHIR
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
TEKNIS BAGI KOPERASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT
CALON PENERIMA HIBAH 2015
(Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Tulungagung dan Kabupaten Pamekasan)



TIM:

Dr. Lilis Yulianti, S.E., M.Si

Ari Subagyo, S.E., M. Si

Andriana, S.E., M.Sc., Ak

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dan
Lembaga Penelitian Universitas Jember
2014



- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
Selain sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi adalah sangat prinsipil.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.2. Kelompok Masyarakat

Community dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, Aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna



kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis “community” berasal dari komunitas yang berakar pada komunitas atau komunitas. Community mempunyai dua arti (Talizi, 1990-49) :

- a. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama
- b. Sebagai suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (city).

Hillery (1995) dan Lewis (1977) telah menyimpulkan banyak literatur dan mengusulkan empat komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen dalam pembangunan masyarakat. Tetapi, tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah, atau batas wilayah dalam definisi komunitas mereka. Wilkinson (1986) berpendapat bahwa komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa. Tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila dijadikan salah satu karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok. Pendapat lain mendengar bahwa komunitas diidentifikasi sebagai pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (self contained) dan yang satu berbeda dengan lainnya :

- a) Komunitas memiliki kesadaran kelompok (group consciousness) yang kuat.
- b) Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal pribadi tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien.

- c) Komunitas bersifat homogeny
- d) Komunitas hidup mandiri (self sufficient).

Menurut ensiklopedi Indonesia, istilah “masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian :

- a) Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok social berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok social lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemeinschaft* atau masyarakat paguyuban.
- b) keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan.
- c) Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu autonomi (relative), seperti masyarakat barat, masyarakat primitive yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.

Bedasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai social yang berlaku sebagai berikut.

- a) Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- b) Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir.
- c) Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya.
- d) Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam.

- e) Menurut penataan lingkungan /pemuian masyarakat seperti masyarakat desa, kota , metropolitan.
- f) Menurut lingkungan prgaulan agama seperti ulama, santri, gereja.
- g) Menurut tingkat peradaban seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab yang didikotomikan dengan masyarakat jahiliah.
- h) Menurut tingkat kehidupan social seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya.
- i) Menurut jenis kelamin yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.

Dari contoh pengelompokan masyarakat seperti di atas dalam konteks pemberdayaan masyarakat maka focus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan mengingat kondisi masyarakat tidak berdaya. Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung Sembilan nilai (the competent community) (talizi, 1990 : 57-58)

- 1) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.
- 2) Komunitas memiliki otonomi, kewenangan,dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
- 3) Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- 4) Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
- 5) Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
- 6) Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota.
- 7) Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.

- 8) Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
- 9) Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict Drs.H.Roesmidi,M.M buku pemberdayaan masyarakat

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Emile Durkheim (1951) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Cara yang baik untuk mengerti tentang masyarakat adalah dengan menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

- 1) Manusia yang hidup bersama Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
- 2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama.
- 3) Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Penggunaan kata “*empowerment*” dan “*to empower*” diterjemahkan menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Konsep *empowerment* (pemberdayaan) yang dirintis oleh Friedmann (1992: 124) memunculkan adanya

2(dua) premis mayor, yaitu “*kegagalan dan harapan*” dalam memandang konsep keynesian. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi terdahulu dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Harapan muncul karena adanya model-model pembangunan alternatif yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan menurut Friedman bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral yang berkembang dalam lokalitas. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan hanyalah gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Sementara itu Blanchard (2001: 6) mendefisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk mengurangi belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya.

“The real essence of empowerment comes from releasing the knowledge, experience, and motivational power that is already in people but is being severely underutilized”

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat di mana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Konsep partisipasi yang aktif dan kreatif atau seperti yang dikemukakan oleh Paul dalam Cohen sebagai berikut :

“Participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”.

Soetrisno (1995: 74) menyatakan bahwa ada dua definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu: *Definisi pertama* partisipasi rakyat dalam



pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi inipun disamakan dengan kemauan rakyat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Dipandang dari sudut sosiologis definisi ini tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi rakyat dalam pembangunan melainkan mobilisasi rakyat dalam pembangunan. *Definisi kedua* partisipasi dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang dibangun di wilayah mereka serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan hasil proyek itu.

Sementara itu para ahli yang berpendapat bahwa partisipasi dikonsepsikan secara baru sebagai suatu insentif moral yang mengizinkan kaum miskin yang tidak berdaya untuk merundingkan insentif-insentif material baru bagi diri mereka dan sebagai suatu terobosan yang memperbolehkan masyarakat *grassroot* berhasil mendapatkan jalan menuju bidang-bidang makro pembuatan keputusan. Upaya masyarakat miskin melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui power yang dimilikinya merupakan bagian dari pembangunan manusia (*personal/human development*). Pembangunan manusia merupakan proses kemandirian (*self-reliance*), kesediaan bekerjasama dan toleran terhadap sesamanya dengan menyadari potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terwujud dengan menimba ilmu dan ketrampilan baru, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam komunitas mereka. Dengan demikian, partisipasi merupakan aspek terpenting dalam upaya memberdayakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.



Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Alternatif konsep pertumbuhan ini oleh Friedmann (1992:68) disebut sebagai *alternative development* (pembangunan alternatif) yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*” (demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesetaraan gender dan persamaan antara generasi). Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible and antithetical*” (tidak cocok dan antitetis). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*Zero sum game*” dan “*trade-off*” (prinsip pilih salah satu). Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan serta akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (dalam Kartasasmita, 1996: 90), “*theright kinds of growth*” (pertumbuhan yang benar), yakni bukan pertumbuhan vertikal yang menghasilkan “*trickle-down*” seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horisontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive, and compartmentalized* (berbasis luas, intensif tenaga kerja, dan saling melengkapi).

2.4 Partisipasi Anggota Koperasi dan Kepentingannya

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Pendirian koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan bertanggung jawab terhadap perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut menanggung resiko usaha



koperasi, serta secara proaktif ikut serta dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi.

Partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya (*dual identity*), yaitu anggota sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan membuat keputusan; sedangkan sebagai pengguna/pelanggan, anggota koperasi wajib memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan oleh koperasi. Derajat ketergantungan antara anggota dengan perusahaan koperasi atau sebaliknya akan menentukan baik buruknya perkembangan organisasi maupun usaha koperasi. Semakin kuat ketergantungan anggota dengan perusahaan koperasi, maka semakin tinggi dan baik perkembangan organisasi dan usaha koperasi, sehingga koperasi merasakan manfaat keberadaan koperasi dan koperasi semakin sehat berkembang sebagai badan usaha atas dukungan anggota secara penuh. Koperasi memberikan manfaat (*cooperative effect*) secara ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota, dan anggota mendukung, berinteraksi, dan proaktif bagi perkembangan usaha koperasi.

Partisipasi anggota dengan perusahaan koperasi seringkali juga terjadi konflik atau biasanya terjadi ketimpangan karena perbedaan kepentingan atau adanya konflik kepentingan antara anggota dengan koperasi. Perbedaan kepentingan ini dilatarbelakangi juga oleh homogenitas kepentingan anggota dengan perusahaan koperasi akan semakin harmonis hubungan keorganisasi maupun keusahaan koperasi, sehingga partisipasi anggota juga semakin tinggi. Beberapa kepentingan yang berkaitan dengan hal ini menyangkut tingkat pelayanan, kepentingan organisasi, serta penentuan dan pembagian sisa hasil usaha. Koperasi sebagai perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan anggota dengan berbagai variasinya maupun keterpencaran jarak anggota dalam proses pelayanan atas kebutuhan anggota.

Koperasi diharuskan meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, mengingat pelayanan terkait dengan adanya tekanan persaingan dari organisasi perusahaan lain (non koperasi). Koperasi harus layak dan efisien



memberikan layanan yang dapat dinikmati secara sosial ekonomi oleh anggota, disamping juga mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan kebutuhan atau kepentingan dari anggota. Perubahan kebutuhan anggota berhubungan lurus dengan perubahan waktu peradaban, dan perkembangan jaman, sehingga hal ini menentukan pula pola kebutuhan anggota dalam konsumsi, produksi, maupun distribusi. Kondisi ini memosisikan koperasi harus mampu memberikan pelayanan prima yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Jika perusahaan koperasi member pelayanan kepada anggota yang jauh lebih besar, lebih menarik, dan lebih primadibanding dengan dari perusahaan non koperasi, maka koperasi akan mendapat partisipasi penuh dari anggota. Demikian pula sebaliknya, partisipasi anggota yang tinggi dalam memanfaatkan segala layanan barang, jasa, yang tersedia dikoperasi pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terbaik dan prima oleh perusahaan koperasi.

2.5 Bentuk Partisipasi Anggota

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi maupun usaha koperasi.

Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha.

Partisipasi anggota juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik kedudukan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna/pelanggan.

Keikutsertaan anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Secara umum, partisipasi anggota koperasi menyangkut partisipasi terhadap sumberdaya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan, atau seringkali dibuat kategori partisipasi kontributif, partisipasi insentif.

Sejalan dengan kedudukan anggota koperasi yang memiliki identitas ganda baik sebagai pemilik maupun pengguna/pelanggan, maka bentuk partisipasi anggota juga mengikutinya. Sebagai pemilik, anggota memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dan bentuk kontribusi keuangan, penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan, serta ikutserta dalam mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan koperasi maupun aktif dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan organisasi koperasi dan kinerja usaha koperasi. Selanjutnya sebagai pengguna, anggota memanfaatkan berbagai potensi dan layanan yang disediakan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan menunjang kegiatan usaha koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara generic terdapat beberapa bentuk partisipasi anggota koperasi, yaitu :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan, dan penyampai /mengemukakan pendapat/ saran/ ide/ gagasan/ kritik bagi koperasi).
- 2) Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela/manasuka, jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal).
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupu jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan, bentuk transaksi, waktu layanan).

- 4) Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi).

2.6 Perencanaan Teknis Organisasi

Perencanaan sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum Kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Menurut George R. Terry perencanaan adalah:

“planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired result”

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan (Gaffar, 1987). Fungsi perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biayanya. Yang dimaksud dengan Perencanaan pembelajaran berdasarkan beberapa pendapat, yakni;

- a. Secara garis besar perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi/bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, alat atau media apa yang diperlukan (R. Ibrahim 1993:2).
- b. Perencanaan Pembelajaran sebagai pedoman mengajar bagi guru/calon guru dan pedoman belajar bagi siswa.
- c. Perencanaan Pembelajaran merupakan acuan jelas, operasional, sistematis sebagai pedoman guru dan siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukan.

Perencanaan Pembelajaran mikro, yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilakukan. Karakteristik Pembelajaran Mikro, setiap unsur perencanaan tersebut lebih disederhanakan, dan ada penekanan terhadap jenis keterampilan apa yang akan dilatihkan.

Kesimpulan yang ditarik dari benang merah diatas, Perencanaan Pembelajaran adalah proses memperoyeksikan dari setiap komponen pembelajaran. Langkah-Langkah dalam Perencanaan Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah tersebut adalah :

- a. Menetapkan sasaran Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber agar lebih efektif.
- b. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini Jika sasaran telah ditetapkan , pimpinan harus mengetahui dimana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut , sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini. Untuk ini di dalam organisasi harus terdapat suasana keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar terutama data keuangan dan statistik.
- c. Mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal , yang diperkirakan dapat membantudan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Diakui jauh lebih mudah mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini , dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat kedepan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan.

- d. Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ,mengevaluasi alternatif alternatif ini,dan memilih mana yang dianggap paling baik , cocok dan memuaskan.



Dalam setiap organisasi rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasinya. Pada setiap jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda: sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang dibawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang diatasnya. Ada dua jenis rencana , yaitu : (1) rencana strategik, yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu melaksanakan misi organisasi, (2) rencana operasional , yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan.

Rencana operasional terdiri atas beberapa bentuk, yaitu : (1) rencana sekali pakai (single use plan) yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai; (2) rencana permanen (standing plans), yakni pendekatan pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.

Adapun perencanaan strategik sering juga disebut perencanaan jangka panjang (longe range planning) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

2.7 Dana Hibah

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur
3. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah
4. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD

5. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan Memenuhi persyaratan penerima hibah

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. memiliki kepengurusan yang jelas
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
3. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang penuh diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
4. telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana Pendamping.

Hibah Mempunyai 3 bentuk, yaitu :

1. Hibah dalam bentuk uang;
2. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Permohonan tertulis



sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:

1. proposal sekurang-kurangnya memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana Hibah.
2. fakta Integritas.
3. surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit.
4. Foto copy Akta Pendirian bagi organisasi kemasyarakatan.

Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah meliputi, antara lain:

1. Akta Notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit
3. Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah
4. NPWP
5. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat
6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang
7. Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pejabat yang berwenang
8. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain
9. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah
10. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. Surat Permohonan dan dokumen proposal hibah sebagaimana dimaksud disampaikan dan





diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. Unit kerja sebagaimana dimaksud meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya.



BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga jenis bentuk kegiatan yaitu seminar, diskusi, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Untuk pemateri dalam seminar, diskusi, dan FGD adalah dengan mengundang narasumber/ pakar yang sudah paham tentang koperasi khususnya manajemen perencanaan dalam organisasi.

3.2 Waktu, Tempat, dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tiap tiap kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015

No.	Waktu	Durasi	Acara	Keterangan
1.	08.00 - 08.30	30 menit	Tanda tangan kehadiran peserta Pengambilan snack & drink	
2.	08.30 - 09.30	60 menit	Pembukaan - Menyanyikan Indonesia Raya - Sambutan dan Laporan Dinas Koperasi dan UKM	Sambutan dipersilahkan bagi Bapak Pejabat daerah atau provinsi
3.	09.30 - 10.30	60 menit	Materi "Pengarahan Tentang Hibah"	Pemateri oleh tenaga ahli di bidangnya
4.	10.30 - 12.30	90 menit	Materi pendampingan pembuatan proposal hibah	Dipersilahkan untuk 15 penanya
5.	12.30 - 13.00	30 menit	Sesi tanya jawab	Dipersilahkan untuk 15 penanya
6.	13.00 -		Penutupan (makan siang)	

3.2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015 dengan spesifik target sasaran adalah pengurus koperasi dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Jumlah Sasaran Pendampingan Berdasarkan Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran
1.	Kabupaten Nganjuk	Kab tidak bersedia mengajukan calon penerima hibah
2.	Kabupaten Trenggalek	Kab tidak bersedia mengajukan calon penerima hibah
3.	Kabupaten Tulungagung	143
4.	Kabupaten Pamekasan	50

3.3 Rincian Teknis Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1 Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, beberapa kegiatan teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi akuntabilitas koperasi dilakukan. Tahapan persiapan meliputi:

1. Koordinasi dengan koperasi dan kelompok bersangkutan

Koordinasi dengan koperasi bersangkutan melalui jaringan telpon dengan menghubungi langsung koperasi dan kelompok yang bersangkutan. Koordinasi pada koperasi dan kelompok yang bersangkutan diwakili oleh Dinas Koperasi Kabupaten setempat sehingga kejelasan informasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik.

2. Negosiasi hari pelaksanaan kegiatan

Negosiasi hari pelaksanaan kegiatan dilakukan mengingat adanya kesibukan lain koperasi yang bersangkutan. Negosiasi hari pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten setempat sehingga kejelasan tanggal pelaksanaan dapat tercapai. Hasil negosiasi disepakati tanggal pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015.

3. Deskripsi teknis kegiatan pendampingan

Deskripsi teknis meliputi apa-apa dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh peserta yang bersangkutan dalam membantu menyelesaikan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015. Hal teknis yang perlu untuk disiapkan oleh peserta yang bersangkutan antara lain :

- a. Partisipan kegiatan diwakili oleh satu orang yang dapat terwakilkan dari jajaran pengurus, pengawas, koordinator, dan anggota.
- b. Rancangan Anggaran Biaya Kerja.
- c. Identitas (kartu tanda penduduk)

Selebihnya untuk hal teknis seperti lembar absensi kehadiran, konsumsi, lembar berita acara, tempat acara dan lembar serah terima seminar kit dikoordinasi oleh panitia pelaksana.

3.3.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan rangkaian proses pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015. Acara dibuka langsung oleh Jajaran Pemerintah Dinas Koperasi Kabupaten setempat dan ditutup dengan narasumber tim ahli dari Universitas Jember. Selama jalannya acara tidak terdapat halangan, seluruh materi yang hendak disampaikan kepada partisipan telah tersampaikan dengan baik oleh narasumber yang diundang untuk mengisi pada koperasi yang bersangkutan.

3.3.3 Tahapan Penyusunan Hasil Kegiatan

Tahap penyusunan kegiatan merupakan tahapan merekap semua hasil kegiatan yang telah dilakukan. Rekap yang dimaksud adalah mengumpulkan



proposal-proposal yang telah disusun oleh para peserta setelah acara pendampingan dilaksanakan.

Berkas-berkas tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kabupaten para peserta yang selanjutnya akan digunakan sebagai laporan akhir kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015 .

3.4 Pemateri Sosialisasi

Pemateri kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015 ini dijelaskan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemateri Kegiatan Bimbingan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015

No.	Pemateri
1.	Dr. Lilis Yuliati, SE.,M.Si
2.	Ari Subagyo, SE, Msi
3.	Andriana, SE, MSc.,Ak



BAB IV PEMBAHASAN

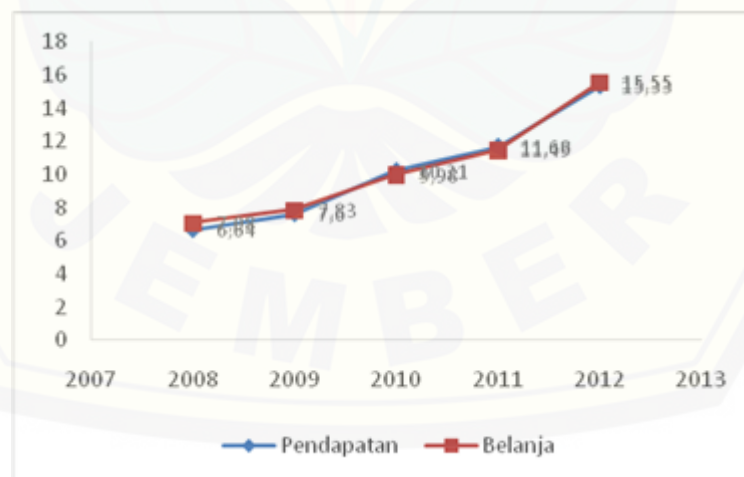
4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Pemerintahan

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintahan Provinsi Jawa Timur selama periode 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi pendapatan daerah selalu lebih tinggi dari yang di targetkan setiap tahunnya. Akan tetapi realisasi belanja daerah selalu lebih rendah dari yang di targetkan.

Target dan realisasi pendapatan daerah masing-masing adalah sebagai berikut: Rp. 5,71 trilyun (target 2008); Rp 6,69 trilyun (target 2009); 8,84 trilyun (target 2010); Rp 10,95 trilyun (target 2011); 15,09 trilyun (target 2012), yang realisasi masing masing mencapai Rp 7,08 trilyun (2008), Rp 7,83 trilyun (2009), Rp 9,98 trilyun (2010), Rp. 11,49 trilyun (2011) dan Rp. 15,55 trilyun (2012).

Gambar 4.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (trilyun Rp)



Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dari pendapatan sebesar Rp. 11,55 trilyun pada tahun 2012, sebanyak 62,59 persen atau sebesar Rp. 9,73 trilyun adalah pendapatan asli daerah (PAD),

sedangkan sisanya adalah pendapatan transfer sebesar 37,19 persen atau Rp. 5,78 trilyun dan pendapatan lain lain yang sah sebesar 0,22 persen atau Rp. 34,24 milyar. Pada tahun 2012 realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan. Belanja ini terbagi menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer bagi hasil pendapatan ke pemerintah kabupaten/kota.

Target belanja daerah selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut: pada tahun 2008 target belanja adalah sebesar Rp. 7,31 trilyun dan mempunyai realisasi sebesar Rp. 6,64 trilyun. Pada tahun berikutnya target belanja adalah masing-masing Rp. 8,40 trilyun (2009), Rp. 10,51 trilyun (2010), Rp. 12,31 trilyun (2011) dan Rp 16,01 trilyun (2012) . sedangkan realisasinya adalah masing masing Rp. 6,64 trilyun (2008), Rp. 7,60 trilyun (2009), Rp. 10,21 trilyun (2010), Rp. 11,68 trilyun (2011) dan Rp. 15,33 trilyun (2012).

Perkembangan dana alokasi di Jawa Timur terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana penyesuaian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 9,73 trilyun. Atau meningkat sebesar 9,38 persen disbanding tahun sebelumnya. Dana perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar 25,78 persen yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 2,44 trilyun menjadi Rp 3,07 trilyun pada tahun 2012. Kontribusi terbesar dari dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 48,60 persen atau sebesar Rp. 1,49 trilyun.

Pada tahun 2012 Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 10,49 persen disbanding dengan tahun 2011. DAU pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,35 trilyun meningkat menjadi Rp.1,49 trilyun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar -2,80 persen atau Rp. 55,03 trilyun di tahun 2010 menjadi Rp. 53,49 milyar di tahun 2012. Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 52,40 persen atau sebesar Rp. 1,52 trilyun di banding tahun 2011 sebesar Rp. 1,00 trilyun

Kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk membayar pajak sangat tinggi, hal ini terbukti dengan adanya kenaikan realisasi pajak yang begitu signifikan

selama periode 2008-2012 yaitu sebesar 74,41 persen. Dengan demikian sampai saat ini pajak daerah masih menjadi tulang punggung penerimaan PAD dan pembiayaan pembangunan di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012, pajak daerah realisasinya mencapai Rp. 7,82 trilyun, nilai tersebut melebihi dari pajak yang di tagetkan sebesar Rp.7,73 trilyun. Sedangkan target pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut : Rp. 3,37 trilyun (2008), Rp.3,97 trilyun (2009), Rp. 5,32 trilyun (2010), Rp. 6,88 trilyun (2011) dan realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 4,48 trilyun, Rp. 4,89 trilyun (2009), Rp. 5,91 trilyun (2010), Rp. 7,30 trilyun (2011).

Gambar 4.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Jawa Timur (Trilyun Rupiah)
Tahun 2008-2012



Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

4.1.2 Penduduk

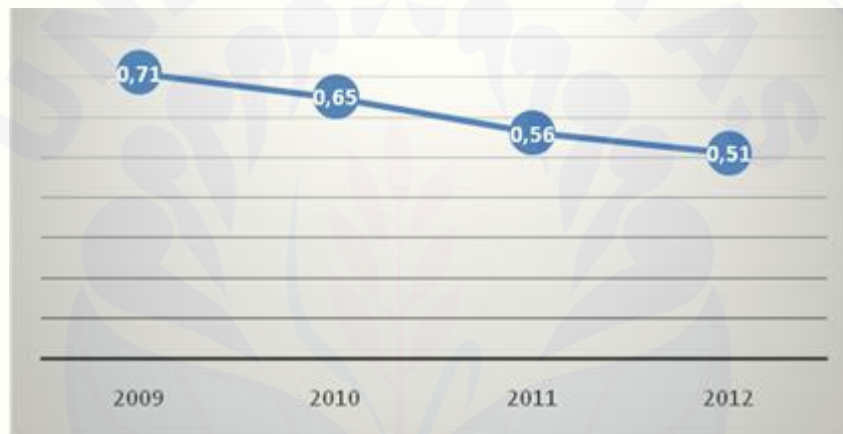
Selama periode 2009-2012 jumlah penduduk Jawa Timur selama terus mengalami peningkatan hingga mencapai 37.879.713 jiwa pada tahun 2012. Dengan luas wilayah sekitar 47.963 km², maka kepadatan penduduk sekitar 790 jiwa per km².

Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di bandingkan kabupaten/kota lainnya. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surabaya mencapai 8.432 jiwa per km². Kota Surabaya merupakan salah satu kota favorit di Jawa Timur untuk mengdu nasib karena lapangan kerja yang relatif luas. Dengan kepadatan kepadatan penduduk yang

tinggi maka pemerintah perlu mencanangkan program peningkatan sarana dan prasarana khususnya di bidang pemukiman sehingga dampak negative kepadatan penduduk ini bisa diminimalisasi di masa mendatang. Kota Malang adalah kota terpadat kedua di Jawa Timur dengan kepadatan 7.521 jiwa per km². Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan di Jawa Timur sekaligus sebagai tujuan wisata.

Pertumbuhan penduduk di Jawa Timur pada tahun 2012 tercatat 0,51 persen tingkat pertumbuhan penduduk ini tersebut mengalami perlambatan disbanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,65 persen.

Gambar 4.3
Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2010 (%)



Sumber : Data Penduduk berdasarkan hasil proyeksi Supas 2005, BPS provinsi

Ditinjau dari *sex rationya*, Jawa Timur memiliki *sex ratio* 97,49. Hal ini menunjukkan bahwa setiap seratus penduduk perempuan di Jawa Timur terdapat 98 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2012 sekitar 37.879.713 orang. Piramida penduduk Jawa Timur menunjukkan bahwa penduduk di Jawa Timur didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal tersebut dibuktikan dengan komposisi penduduk usia produktif sekitar 68,23 persen, komposisi penduduk usia muda (0-14 tahun.) sekitar 25,99 persen dan usia tua (65 + tahun) sebesar 5,68 persen. Angka ketergantungan (*age dependency ratio*) penduduk Jawa Timur sebesar 46,56 persen, ini berarti bahwa secara



hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 46-47 orang penduduk usia tidak produktif.

Jawa Timur memiliki 24 tujuan Transmigrasi, pada Tahun 2012 transmigran terbanyak adalah di Sumatra Selatan sebanyak 110 kepala keluarga (KK) 304 Jiwa, sekitar 16,44 persen dari KK yang mengikuti transmigrasi, baik transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri. Kalimantan Timur adalah daerah favorit kedua untuk transmigrasi, dengan jumlah KK yang bertansmigrasi sebanyak 100 KK atau sebesar 14,95 persen dari total KK yang mengikuti transmigrasi.

Pada tahun 2012 di Jawa Timur daerah asal transmigran terbanyak adalah kabupaten Banyuwangi sebanyak 72 KK, 24 Jiwa atau sebesar 10,96 persen dari total KK yang mengikuti transmigrasi, baik transmigrasi umum atau transmigrasi swakarsa mandiri. kemudian kabupaten Magetan sebanyak 49 KK (7,46 persen) 140 jiwa, Kabupaten Sampang sebanyak 45 KK (6,85 persen) 120 jiwa, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 40 KK (6,09 persen) 109 jiwa.

Selama periode 2010-2011 jumlah pasangan usia subur (PUS) di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 3,97 persen. Jumlah PUS pada tahun 2010 sebanyak 7.846.174 pasangan menjadi sebanyak 8.157.728 pasangan pada tahun 2012. Kenaikan PUS tersebut seiring dengan kenaikan peserta KB aktif. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, yaitu sebanyak 3.018.041 pasangan atau sekitar 48,20 persen dari peserta KB aktif pada tahun 2012 PUS pengguna alat kontrasepsi suntik mengalami kenaikan sebesar 1,74 persen disbanding tahun sebelumnya. Tablet/pil merupakan alat kontrasepsi yang juga sangat diminati dikalangan masyarakat, namun demikian mulai tahun 2010-2012 pengguna tablet/pil menurun sebesar -1,76 persen. Pada tahun 2012 pengguna tablet/pil sebanyak 1.311.822 pasangan atau sebesar 20,95 persen dari peserta KB aktif.

Alat kontrasepsi yang lain yang lazim digunakan oleh kalangan masyarakat sampai saat ini yaitu Kondom, Kontrasepsi Pria, kontrasepsi Wanita, Susuk dan Alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR). Pada tahun 2012 jumlah





pengguna alat kontrasepsi kondom sebanyak 205.919 pasangan (1,69 persen), Kontrasepsi pria sebanyak 29.212 pasangan (0,47 persen), Kontrasepsi wanita sebanyak 311.247 pasangan (4,97 persen) Susuk sebanyak 580.413 pasangan (9,27 persen) dan AKDR sebanyak 904.686 pasangan (14,45 persen) Kontribusi pasangan menikah laki-laki untuk ber KB semakin meningkat secara signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pengetahuan dan pendidikan pasangan di usia subur semakin membaik.

4.1.3 Ketenaga-kerjaan

selama tahun 2010-2012, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja slalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penduduk yang memasuki usia kerja pada tahun 2010 jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 18,70 juta jiwa, dan terus meningkat menjadi 19,08 juta jiwa pada tahun 2012. Hal ini selaras dengan kenaikan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pda tahun 2012 (69,62 peren)disbanding tahun 2010 (69,08 persen).

Kenaikan TPAK salah satunya disebabkan oleh peningkatan mutu sumber daya manusia serta makin bertambahnya wanita yang berperan secara ekonomis diluar mengurus rumah tangga. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang tergolong sebagai bukan angkatan kerja (orang yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 30,38 persen. Persentase yang bukan angkatan kerja terbanyak pada kelompok yang mengurus rumah tangga sebesar 59,70 persen, sementara status bersekolah dan lainya masing masing sebesar 24,07 persen dan 16,23 persen.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) Jawa Timur mengalami kenaikan secara continyu. Pada tahun 2010 TKK di Jawa Timjrr sebesar 95,75 persen kemudian naik pada tahun 2011 menjadi 95,84 persen dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 95,88 persen. Hal ini mengindikasikan jumlah angkatan kerja yang bekerja dari tahun ke tahun ada kecenderungan meningkat. Pemerintah perlu



mengupayakan peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing melalui pendidikan formal maupun informal.

Tabel 4.1
Indikator Ketenagakerjaan di Jawa Timur
Tahun 2010-2012

No.	Kegiatan Utama	Agustus		
		2010	2011	2012
1.	Bekerja (jutaan)	18.7	18.94	19.08
2.	Penganggur (jutaan)	0.83	0.82	0.82
3.	TPAK (%)	69.08	69.49	69.62
4.	TPT (%)	4.26	4.16	4.12
5.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95.75	95.84	95.88

Sumber : Sakernas, 2012

Pada tahun 2012, pasar kerja di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh tenaga kerja di sector pertanian dengan persentase sebesar 39,16 persen, sedikit menurun disbanding tahun 2011 yaitu sebesar 39,70 persen. Sector lain yang cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sector perdagangan yaitu sebesar 20,09 persen. Sector industry dan jasa mengikuti dengan tenaga kerja sebesar 14,86 persen dan 13,06 persen. Sector keuangan, pertambangan dan listrik menyerap tenaga kerja paling sedikit, masing-masing sebanyak 1,82 persen, 0,75 persen dan 0,16 persen.

4.1.4 Pendidikan

Jumlah sekolah untuk SD sederajat (SD negeri/swasta dan SD ibtdaiyah negeri/swasta), SMP sederajat (SMP negeri/swasta dan SMP tsanawiyah negeri/swasta) dan SMA sederajat (SMA negeri/swasta dan SMA Aliyah negeri/swasta dan SMK) pada tahun 2012 masing masing sebanyak 26.462 unit, 6.824 unit dan 3.855 unit, dengan jumlah murid sebanyak 4.131.594 siswa (SD),



1.839.607 siswa (SMP) dan 1.269.121 siswa (SMA). Sedang jumlah guru yang mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut adalah 296.861 orang (SD), 150.212 (SMP) dan 108.788(SMA).

Rasio guru persekolah, tertinggi pada sekolah SMA (28 guru per sekolah). Demikian pula untuk rasio murid persekolah, terbanyak pada SMA dengan rasio 329 murid per sekolah. Masih dirasakan perlu untuk penambahan setingkat SMA. Tetapi untuk rasio murid per guru di ketiga jenjang sekolah tersebut oleh dibilang ideal karena berkisar 12-14 murid per guru.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD pada tahun 2012 sebesar 98,66 persen. Artinya dari 100 anak yang berusia sekolah SD, terdapat sekitar 98-99 anak yang masih belajar disekolah. APS SMP lebih rendah dari APS SD, yaitu sebesar 91,71 persen, dan tercatat 7,98 persen sudah tidak sekolah lagi (putus sekolah) dan 0,31 persen tidak/belum pernah sama sekali masuk SMP. Untuk APS SMA lebih kecil lagi hanya 61,68 persen dan tercatat 0,57 persen anak yang berekolah SMA tidak melanjutkan ke SMA, dan 37,75 persen tidak sekolah lagi (putus sekolah). Pola APS yang semakin menurun pada kelompok umur atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi salah satunya disebabkan karena masuknya mereka pada dunia kerjadan juga kurang meratanya kesempatan bagi sebagian penduduk dalam mengakses pendidikan untuk jenjang yang semakin tinggi.

Rata-rata lama sekolah atau *means years schooling* (MYS) di Jawa Timur mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010 MYS tercatat sebesar 7,24 tahun dan meningkat tipis pada tahun 2012 menjadi 7,48 tahun. Dengan demikian rata-rata orang yang mengenyam pendidikan formal pada tahun 2012 selama 7,48 tahun. Tentunya ini sangat berpengaruh pada penyediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai di bursa tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu dukungan program program pemprov dan pemkab/pemkot secara kontinyu seperti wajib belajar 18 tahun yang diikuti program beasiswa khususnya bagi penduduk miskin.



Tabel 4.2
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru beserta Rasio-rasio Jawa Timur 2012

	Sekolah (Unit)	Murid (orang)	Guru (Orang)
SD	26.428	4.131.594	296.861
SMP	6.824	1.839.607	150.212
SMA	3.855	1.269.121	108.778
	Guru/Sekolah	Murid/Sekolah	Murid/Guru
SD	11	156	14
SMP	22	270	12
SMA	28	329	12

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

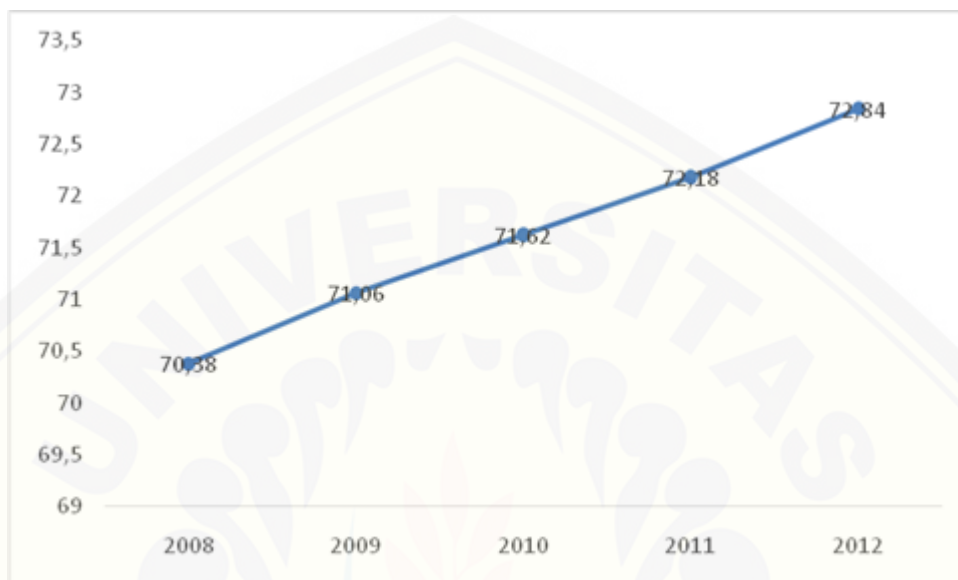
Angka melek huruf laki laki pada tahun 2012 sebesar 94,25 persen, sementara angka melek huruf perempuan sebesar 86,61 persen. Sekitar 13 persen penduduk perempuan di Jawa Timur masih utu huruf. Posisi bagi perempuan yang masih kurang menguntugkan ini menyebabkan Jawa Timur masih lemah dalam menyiapkan SDM perempuan yang terampil di berbagai bidang social, ekoomi dan teknologi.

4.1.5 Pembangunan Manusia

Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya dapat diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM). Capaian angka IPM di jawa timur selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2008 IPM Jawa Timur mencapai 70,38 persen, dan kemudian meningkat terus menjadi 71,06 (2009); 71,62 (2010); 72,18(2011) dan tercatat 72,84 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di jawa Timur selalu

mengalami perbaikan dilihat dari sisi kualitas kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya belinya.

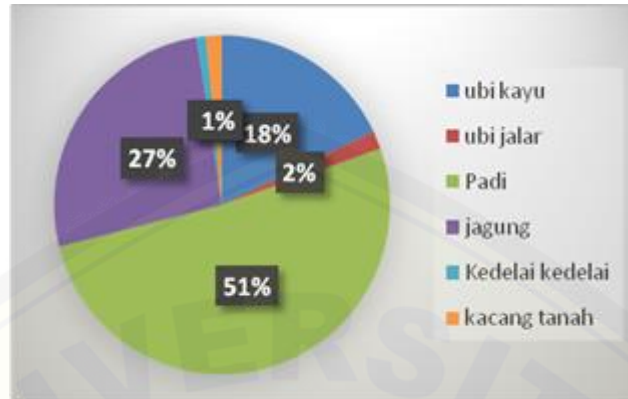
Gambar 4.4
Indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2007-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil perhitungan IPM tahun 2008-2012, tercatat bahwa 18 Kabupaten/Kota Mempunyai IPM lebih tinggi dari pada IPM Jawa Timur, sedangkan 20 Kabupaten lainnya memiliki nilai IPM di bawah angka IPM Jawa Timur. Kota Malang mempunyai IPM tertinggi disbanding kabupaten atau kota lainnya dengan IPM sebesar 78,40, sedangkan Kabupaten Sampang tercatat mempunyai IPM terendah sebesar 61,67.

Gambar 4.5
Kontribusi Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2010-2012



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu komoditi tanaman pangan utama di Jawa Timur produksi padi sangat perlu di perhatikan. Setelah mengalami penurunan produksi di periode 2010-2011, hasil produksi tanaman padi mengalami peningkatan di tahun 2012, dari tahun 2011 sebesar 10,58 ton meningkat menjadi 12,20 juta ton pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 15,34 persen.

Peningkatan produksi ini tak lain dikarenakan produktivitas tanaman padi yang meningkat akibat kemarau basah, yang terjadi pada tahun 2012. Tercatat produktivitas pada tahun 2012 sebesar 61,74 Kw/ha. Rata-rata luas panen padi tahun 2012 sebesar 1,98 juta ha. Sedangkan kontribusi padi tahun 2012 terhadap total tanaman pangan di Jawa Timur adalah 51,41 persen. produksi padi memberikan kontribusi terbanyak hasil tanaman pangan di Jawa Timur. Lebih dari 50 persen atau sebesar 12,20 juta ton per tahun. Tak heran bila provinsi Jawa Timur dikatakan sebagai lumbung padi selain Provinsi Jawa Barat.

Produksi terbanyak setelah padi adalah jagung. Jagung merupakan komoditas palawija utama ditinjau dari aspek pengusahaan dan penggunaan hasilnya khususnya untuk bahan baku pangan dan pakan ternak. Selama periode 2010-2012, rata-rata jagung yang diproduksi Jawa Timur adalah sebesar 578 ton per tahun dengan luas panen rata-rata 1,23 juta ha. Tanaman pangan yang

mempunyai produktivitas tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2012 adalah tanaman ubi jalar, sedangkan tertinggi kedua adalah ubi kayu.

4.2 Analisis Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Materi Worksop

4.2.1.1 Pengertian koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012). Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran Koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

4.2.1.2 Prinsip koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi adalah sebagai berikut:



a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi

Selain sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi adalah sangat prinsipil.





- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

4.2.1.3 Nilai koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah sebagai berikut::

- a. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

- b. Menolong diri sendiri

Yang dimaksud dengan menolong diri sendiri adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

- c. Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

- d. Demokrasi

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

- e. Persamaan



Yang dimaksud dengan persamaan adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

f. Berkeadilan

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

g. Kemandirian

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab;
- d. kepedulian terhadap orang lain.

4.2.1.4 Dana Hibah

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

6. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

7. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur
8. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah
9. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD
10. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan Memenuhi persyaratan penerima hibah

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. memiliki kepengurusan yang jelas
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
3. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang penuh diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
4. telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana Pendamping.

Hibah Mempunyai 3 bentuk, yaitu :

1. Hibah dalam bentuk uang;
2. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



3. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:

1. proposal sekurang-kurangnya memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana Hibah.
2. fakta Integritas.
3. surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit.
4. Foto copy Akta Pendirian bagi organisasi kemasyarakatan.

Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah meliputi, antara lain:

1. Akta Notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit
3. Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah
4. NPWP
5. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat
6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang
7. Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pejabat yang berwenang
8. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain



9. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah
10. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. Surat Permohonan dan dokumen proposal hibah sebagaimana dimaksud disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. Unit kerja sebagaimana dimaksud meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya.

4.2.2 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Calon Penerima Hibah

Program pendampingan penyusunan dokumen perencanaan teknis bagi koperasi dan kelompok masyarakat diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan teknis yang baik dan benar sesuai standar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Saat ini masih banyak kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang belum mengerti dan memahami tentang penyusunan dokumen perencanaan teknis, hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari kelompok masyarakat adalah wanita yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan peserta pendampingan dari pengurus kelompok masyarakat yang masih produktif .

Dengan adanya program pendampingan ini diharapkan bagi setiap kelompok masyarakat dapat membuat dan menyusun dokumen perencanaan teknis untuk keperluan pengajuan hibah bagi kelompok masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Pendampingan ini dilaksanakan sesuai dengan susunan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat kordinasi internal tim pelaksana terkait materi dan konsep kegiatan pendampingan.
2. Kordinasi dengan dinas koperasi daerah
3. Tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan:
 - a. Sesi Worksop
 - b. Sesi pendampingan lapangan
4. Tahap pengumpulan dokumen perencanaan teknis

4.2.3 Rapat Kordinasi Internal

Rapat kordinasi internal dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri oleh seluruh personil tim ahli pendampingan beserta seluruh tenaga sub professional. Rapat ini bertujuan untuk membuat susnan acara, *time schedule* dan susunan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan worksop dan pendampingan lapangan.

1. Rapat kordinasi I
 - Waktu : 21 September 2015
 - Tempat : Universitas Jember
 - Peserta : 3 orang tim ahli utama
 - 1 orang sekretaris
 - 2 orang Administrator
 - 22 Facilitator
2. Rapat kordinasi II
 - Waktu : 27 September 2015
 - Tempat : Universitas Jember
 - Peserta : 3 orang tim ahli utama
 - 1 orang sekretaris
 - 2 orang Administrator
 - 22 Facilitator

Selain itu rapat ini dilakukan untuk menciptakan kontrol dan evaluasi terhadap data sekunder yaitu berupa daftar kecamatan dan kelurahan serta kondisi medan di setiap daerah yang akan menjadi sasaran lokasi pendampingan . Kegiatan pendampingan harus dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi alam, jumlah kelurahan dan kearifan lokal disetiap daerah. Dengan demikian kegiatan pendampingan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang ditentukan.

4.2.4 Kordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten

Kordinasi dengan dinas koperasi daerah yang akan menjadi lokasi pendampingan penting dilakukan untuk menjalin kerjasama yang baik demi kelancaran kegiatan pendampingan. Komunikasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dapat menciptakan suasana yang baik dan kondusif saat kegiatan pendampingan dilaksanakan. Tujuan dari dilakukanya kordinasi ini adalah:

1. Melakukan identifikasi data sekunder berupa nama-nama, alamat, dan *contac person* setiap organisasi masyarakat yang akan menjadi calon penerima hibah.
2. Mengajukan permohonan penggunaan aula pertemuan milik pemerintah daerah sebagai lokasi diadakanya worksop.
3. Membuat kesepakatan terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Kordinasi dengan dinas koperasi kabupaten setempat diwakili oleh tenaga sub professional dari lembaga penelitian Universitas Jember dan Kepala Bidang Kelembagaan dari Dinas Koperasi Kabupaten. Berikut ini adalah time scheduling kordinasi dengan dinas koperasi daerah:

1. Kordinasi I

Tujuan : Dinas Koperasi Kabupaten Trenggalek

Waktu : 29 September 2014

Personil : 3 orang tenaga sub professional

2. Kordinasi II

Tujuan : Dinas Koperasi Kabupaten Nganjuk

Waktu : 30 September 2014

Personil : 3 orang tenaga sub professional

3. Kordinasi III

Tujuan : Dinas Koperasi Kabupaten Pamekasan

Waktu : 01 Oktober 2014

Personil : 3 orang tenaga sub professional

4. Kordoinasi IV

Tujuan : Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung

Waktu : 02 Oktober 2014

Personil : 3 orang tenaga sub professional

Hasil yang diperoleh dari kordinasi dengan dinas kabupaten setempat adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder berupa nama-nama, alamat, dan nomor telpon para calon penerima hibah di tiap kabupaten setempat.(terlampir)
2. Gedung atau aula yang akan digunakan untuk acara worksop
3. Jadwal kegiatan pendampingan yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya komunikasi dengan dinas koperasi daerah terus berlangsung baik melalui jaringan telepon ataupun email. Kordinasi secara langsung dengan pihak peserta pendampingan diwakili oleh dinas koperasi kabupaten setempat sehingga kejelasan informasi terkait tempat dan waktu dapat tersampaikan dengan baik.

4.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Tahapan pelaksanaan merupakan rangkaian proses pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015. Dalam rangkaian pelaksanaan pendampingan ini dibagi menjadi dua tahap kegiatan yaitu tahap pertama adalah worksop dan dilanjutkan kegiatan pendampingan di tiap kecamatan.

4.2.5.1 Tahap Workshp

Tahap workshp merupakan acara mengumpulkan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat calon penerima hibah untuk diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan dokumen perencanaan teknis. Berikut ini adalah susunan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan workshp:

1. Materi pemahaman tentang perkoperasian. (terlampir)
2. Materi pemahaman tentang dasar hukum dalam perkoperasian dan organisasi masyarakat. (terlampir)
3. Materi pemahaman tentang pemberian hibah. (terlampir)
4. Materi pemahaman dokumen perencanaan teknis (proposal hibah). (terlampir)

Adapun deskripsi teknis meliputi apa-apa dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh peserta yang bersangkutan dalam membantu menyukseskan kegiatan Workshp Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015. Hal teknis yang perlu untuk disiapkan oleh peserta yang bersangkutan antara lain :

- a. Partisipan kegiatan diwakili oleh satu orang yang dapat terwakilkan dari jajaran pengurus, pengawas, koordinator, dan anggota.
- b. Rancangan Anggaran Biaya Kerja.
- c. Identitas (kartu tanda penduduk)

Selebihnya untuk hal teknis seperti lembar absensi kehadiran, konsumsi, lembar berita acara, tempat acara dan lembar serah terima seminar kit dikoordinasi oleh panitia pelaksana.

Susunan acara pelaksanaan workshp Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah Tahun 2015 yang dilaksanakan di tiap kabupaten sesuai dengan tabel 4.3.

Tabel 4.3
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon
Penerima Hibah Tahun 2015

No.	Waktu	Durasi	Acara	Keterangan
1.	08.00 - 08.30	30 menit	Tanda tangan kehadiran peserta Pengambilan snack & drink	
2.	08.30 - 09.30	60 menit	Pembukaan - Menyanyikan Indonesia Raya - Sambutan dan Laporan Dinas Koperasi dan UKM	Sambutan dipersilahkan bagi Bapak Pejabat daerah atau provinsi
3.	09.30 - 10.30	60 menit	Materi "Pengarahan Tentang Hibah"	Pemateri oleh tenaga ahli di bidangnya
4.	10.30 - 12.30	90 menit	Materi pendampingan pembuatan proposal hibah	Dipersilahkan untuk 15 penanya
5.	12.30 - 13.00	30 menit	Sesi tanya jawab	Dipersilahkan untuk 15 penanya
6.	13.00 -		Penutupan (makan siang)	

Acara dibuka langsung oleh Jajaran Pemerintah Dinas Koperasi Kabupaten setempat dan ditutup dengan narasumber tim ahli dari Universitas Jember. Selama jalannya acara tidak terdapat halangan, seluruh materi yang hendak disampaikan kepada partisipan telah tersampaikan dengan baik oleh narasumber. Jadwal pelaksanaan kegiatan workshop sesuai dengan tabel 4.4.

Tabel 4.4
Time Scheduling Kegiatan Workshop Dokumen Perencanaan Teknis

Kab/Kot	Kab. Nganjuk	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kab. Pamekasan
Uraian				
Sasaran	Tidak bersedia menerima calon penerima hibah	Tidak bersedia menerima calon penerima hibah	Pengurus Ormas	Pengurus Ormas
Waktu			11 Okt 2014	19 Okt 2014
Tempat			Gedung Dispar	G. Darmawanita
Jumlah Undangan			159	61
Jumlah Kehadiran			143	50
Pengisi Materi			Tim ahli	Tim ahli
Pembuka Acara			Kabid Kelembagaan Dinkop Kabupaten	Kabid Kelembagaan Dinkop Kabupaten

4.2.5.2 Tahap Pendampingan Lapangan

Setelah melewati serangkaian acara workshop yang diadakan di masing-masing kabupaten selanjutnya akan diberikan pendampingan ke setiap kelompok masyarakat yang ada di tiap kecamatan. Pendampingan secara langsung diberikan

oleh para fasilitator kepada tiap kelompok masyarakat selama dua minggu setelah worksop. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang terkumpul setelah diadakan pendampingan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang Telah Dikumpulkan
Berdasarkan Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran
1.	Kabupaten Nganjuk	Kab tidak bersedia mengajukan calon penerima hibah
2.	Kabupaten Trenggalek	Kab tidak bersedia mengajukan calon penerima hibah
3.	Kabupaten Tulungagung	143
4.	Kabupaten Pamekasan	50

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

1. Kegiatan worksop untuk memberikan motivasi dan pemahan mengenai pentingnya dokumen perencanaan teknis bagi para calon penerima hibah tahu 2015 telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah ditetapkan. Antusiasme peserta calon penerima hibah yang menghadiri acara worksop cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kehadiran peserta di atas 50% dari jumlah total undangan, dan seluruh peserta yang hadir mengikuti susunan acara sampai selesai.
2. Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen teknis dilakukan di setiap kecamatan di tiap kabupaten dengan kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sangat terbatas. Hampir seluruh organisasi masyarakat di setiap desa belum memiliki sarana komputer untuk menyusun berbagai jenis dokumen. Sampai sejauh ini pengurus masih menggunakan sarana komputer milik pribadi ketua atau sekretaris untuk kepentingan organisasi. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang produktif dalam organisasi masyarakat mempengaruhi efisiensi penyusunan dokumen perencanaan teknis untuk pengajuan hibah. Hal ini ditnjukan dengan hasil proposal yang mampu dislesaikan tepat waktu masih dibawah 100% dari total calon penerima hibah tiap kabupaten.

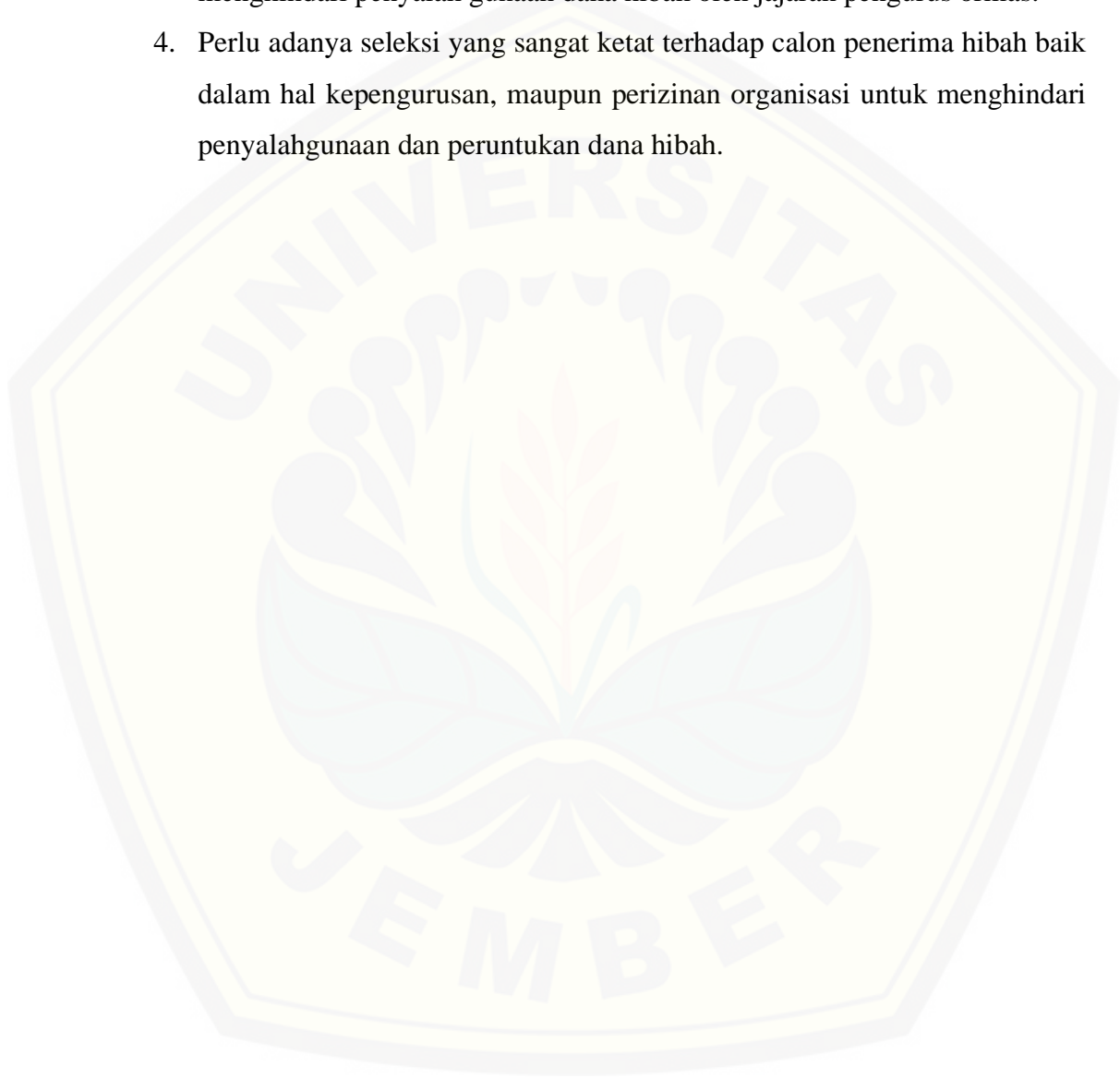
5.2 Rekomendasi

1. Perlu adanya sosialisasi lebih intensif kepada organisasi masyarakat di Jawa Timur terkait manajemen organisasi yang baik demi meningkatkan sumber daya manusia agar lebih efisien dan produktif.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih intensif bagi para calon penerima hibah di tahun selanjtnya mengenai pengelolaan dana hibah untuk kegiatan yang



lebih produktif. Hal ini untuk menghindari penggunaan dana hibah yang tidak sebagaimana mestinya.

3. Perlu adanya audit atau monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah yang telah diberikan kepada organisasi masyarakat pada tahun 2015 untuk menghindari penyalahgunaan dana hibah oleh jajaran pengurus ormas.
4. Perlu adanya seleksi yang sangat ketat terhadap calon penerima hibah baik dalam hal kepengurusan, maupun perizinan organisasi untuk menghindari penyalahgunaan dan peruntukan dana hibah.





DAFTAR PUSTAKA

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2010. *Jenis Koperasi*.

Kadarman, A.M.S. dan Jusuf Udaya. 1997. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan, Malayu S.P., 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

